

PROFESIONALISME APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI DESA PULAU KALIMANTING KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ASYURA MAIPUTRA

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: asyuramaiputra08@gmail.com

ABSTRACT

Village Government is a subsystem of the system of implementing regional government so that villages have the authority to regulate and manage community interests in the framework of autonomous activities. To reach out to a prosperous society requires continuous implementation of good governance. Efforts to realize good governance require professional elements from government officials in carrying out government duties. Professionalist measures in terms of speed in carrying out functions and refers to simplified procedures. In this opinion, the professional concept in the apparatus is seen from the aspect of: creativity (creativity), innovation (innovation), responsiveness (responsivity). This research is arranged based on qualitative research methods with data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation and data analysis techniques used in this study is the analysis of qualitative data with informants totaling 12 people. Based on the result of this research then concluded that the professionalism of village apparatus Kalimantan Island Benai District Kuantan District less professional in the implementation of village governance.

Keywords: Professionalism, Apparatus

ABSTRAK

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara terus-menerus. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi: kreatifitas (creativity), Inovasi (inovasi), Responsifitas (responsivity). Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan informan yang berjumlah 12 Orang. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disimpulkan bahwa Profesionalisme Aparatur Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kurang Profesional Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Asas desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa.

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, ketrampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Profesionalisme merupakan cerminan kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup tingkat kreatifitas, inovasi, dan responsifitas dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Suryaningrat (1992:108) mengemukakan bahwa "Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan negara". Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan tugas pemerintahan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang baik sehingga apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal.

Aparatur desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu seorang aparatur desa harus profesional dalam menjalankan tugas jabatannya, untuk mengetahui profesional atau tidaknya aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa maka di adakan sebuah penelitian yang berdasarkan permasalahan yang terjadi sebagai acuan untuk melakukan penelitian.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Profesionalisme aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Pulau Kalimantan menjadi alasan bagi peneliti untuk dijadikan objek yang akan diteliti, adapun permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Kurangnya inovasi dari aparatur dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak ada pembaharuan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
2. Tingkat pelayanan yang belum baik karena jarang para aparatur desa berada di kantor saat jam kerja. Jika ada masyarakat yang ada keperluan yang berhubungan dengan administratif atau surat menyurat terpaksa harus mengunjungi kerumah.
3. Kepala desa kurang memperhatikan kinerja dan mengarahkan bawahannya sehingga adanya ketidaklaksanaan dari fungsi jabatan yang dijalankan

oleh bawahan tersebut sehingga timbulnya hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa tersebut.

Dari permasalahan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui profesional atau tidaknya aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang di jalankan, karena permasalahan di atas hanya berdasarkan pengamatan secara umum. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara khusus melalui skripsi ini dengan judul **“Profesionalisme Aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Administrasi Negara

Menurut Atmosudirjo (dalam Syafie, 2015 : 4) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

2.1.2 Konsep Birokrasi

J.B.Kristiadi (1994:93), mengatakan bahwa Birokrasi merupakan struktur organisasi di sector pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar jumlahnya. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan, seringkali oleh masyarakat diartikan dalam konotasi berbeda. Birokrasi seolah-olah memberi kesan adanya suatu proses panjang yang berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparat pemerintah.

2.1.3 Konsep Organisasi

Menurut Lubis dan Husein dalam Sedarmayanti (2000:20) dalam bukunya Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi sebagai berikut Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai sesuatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat di pisahkan secara tegas dari lingkungannya.

2.1.4 Konsep Perilaku Organisasi

Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedang aspek kedua pengaruh manusia terhadap organisasi. Pengertian ini sesuai dengan rumusan Kelly dalam bukunya Organizational Behavior yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak dan perilaku individu di lain pihak. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis yaitu untuk mengarahkan perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian tujuan.

2.1.5 Konsep Desa

Menurut peraturan pemerintah RI No.43 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pengertian Desa menurut Peraturan Pemerintah RI No.43 tahun 2014 sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

2.1.6 Konsep Profesionalisme

Menurut Siagian (2000) profesional diukur dari kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesional dalam diri aparat dilihat dari segi :

a. Kreatifitas (*creativity*).

Kemampuan aparat untuk mengahadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja. Terbentuknya aparat yang kreatif hanya dapat terjadi apabila : terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong aparat pemerintah untuk mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkan secara inovatif; adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan.

b. Inovasi (*innovasi*).

Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai.

c. Responsifitas (*responsivity*)

Kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Konsep Aparatur Desa

Menurut pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

2.1.7.1 Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. a) Tugas dan Kewajiban Kepala desa

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

1. Memimpin penyelenggara pemerintah desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
6. Mewakili desanya didalam dan diluar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

b) Wewenang Kepala Desa

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:7-8), wewenang kepala desa yaitu:

1. Memimpin Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa

5. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 6. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 7. Membina kehidupan masyarakat desa.
 8. Membina perekonomian desa.
 9. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- c) Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, kewajiban Kepala desa antara lain:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan epublik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
6. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
7. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
8. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

4) Larangan Bagi Kepala Desa

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2001:9), Larangan Bagi kepala desa yaitu:

1. Menjadi pengurus partai politik
2. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD dan lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan
3. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah

Sekretaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis adminisitratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kapala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa.

a) Persyaratan Sekretaris Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara pengangkatan sekretaris Desa menjadi Peawai Negeri Sipil, Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
3. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
4. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan
5. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;

b) Fungsi Sekretaris Desa

1. Menyusun rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
2. Pelaksanaan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
3. Pengelolaan penata usahaan administrasi keuangan;
4. Pemeliharaan Inventaris dan aset;
5. Menyelenggarakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan koordinasi;

6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

2.1.7.3 Kepala Dusun

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa atau usur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikota/madya kepada daerah tingkat II atas usul kepala desa. Kepala Dusun dibentuk berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Masa jabatan seorang kadus paling lama adalah sekitar lima tahun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Kepala Dusun mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
2. Pelaksanaan Keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.

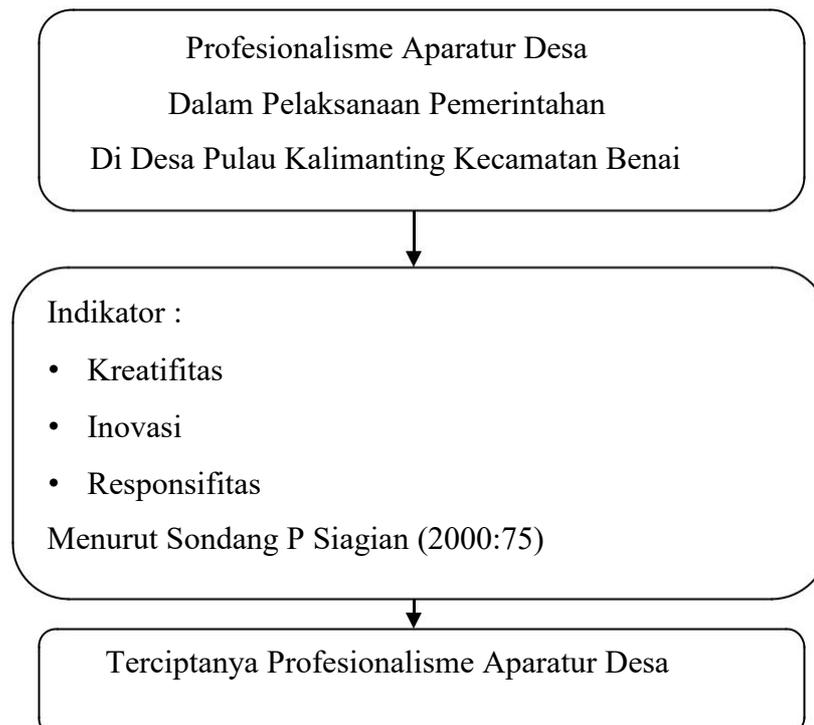
2.1.8 Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Inu Kencana Syafie (2008: 89) yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut: Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.

2.1.9 Konsep Manajemen Publik

Pada dasarnya manajemen public, yaitu manajemen instansi pemerintah. Jadi, manajemen public adalah bagaimana mengatur kepentingan public atau orang banyak. Sedangkan manajemen public menurut Overman dalam Keban (2004:85), adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, controlling satu sisi dengan SDM, Keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber :Modifikasi penelitian tahun 2019

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang Dan kerangka pemikiran diatas, Maka Dapat diajukan Hipotesis penelitiannya yaitu “Diduga Profesionalisme Aparatur Desa dalam pelaksanaan Pemerintahan desa di desa Pulau kalimanting Kecamatan Benai belum baik ”.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penulis mencoba untuk meneliti atau menganalisa dengan mencoba memberikan gambaran atau penjelasan mengenai kenyataan empiris yang dijadikan objek penelitian.

Hadari Nawawi (2007:33), Mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui menggambarkan kenyataan dari kejadian dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal,yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

3.2 Informan

Untuk Memenuhi kelengkapan data peneliti menggali informasi melalui tabel dibawah ini :

3.2.1 Tabel Informan

N O	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kepala Urusan	3
4	Kepala Dusun	2
5	Ketua BPD	1
6	Anggota BPD	4
JUMLAH		12

3.3 Sumber data

Menurut Sujarweni (2014 : 73) Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber, Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data maka sumber data disebut informan yaitu orang-orang yang memberi informasi melalui menjawab pertanyaan secara lisan.

Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data, data ini berupa catatan, lampiran yang telah ada.

3.4 Fokus Penelitian

Tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus.Fokus penelitian ini merupakan batasan-batasan kajian dari variabel yang diangkat

dalam penelitian ini. Adapun maksud yang peneliti inginkan untuk mencapainya dalam menetapkan fokus adalah Profesionalisme aparaturnya di Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan Informan masyarakat dan Pemerintah Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2017 : 226) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2017 : 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal –hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2017 : 231)

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017 : 240) .

3.7 Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan Analisis data model Miles dan Huberman, Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017 : 246) Aktivitas dalam analisis data yaitu *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Dengan reduksi maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan menyingkirkan data yang tidak penting sehingga data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi, atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing-masing remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2017 : 253) .

4. HASIL DAN

PEMBAHASAN 4.1 Indikator

Kreatifitas

Kreatifitas dalam pelaksanaan Pemerintahan merupakan Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja.

4.1.1 Tanggapan Informan Mengenai Bagaimana kemampuan aparatur menghadapi hambatan dalam pelayanan publik

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa kemampuan aparatur desa menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik dengan melihat keadaan yang sebenarnya, tanggapan dari Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa ini sesuai dengan realita yang sebenarnya.

4.1.2 Tanggapan Informan Mengenai Bagaimana kemampuan aparatur desa dalam membangun ide untuk menciptakan sebuah inovasi

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa belum terwujudnya kemampuan yang baik bagi aparatur desa untuk menciptakan ide dalam membangun sebuah inovasi. Hal ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan observasi peneliti selama melakukan penelitian.

4.1.3 Tanggapan Informan Mengenai apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh aparatur desa dalam menciptakan inovasi

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa untuk menciptakan sebuah inovasi diperlukannya musyawarah supaya terciptanya ide-ide yang sifatnya membangun dan berkembang, tapi hal ini menurut peneliti belum terwujud dengan baik karena kemampuan aparatur desa dalam menciptakan ide untuk sebuah inovasi masih kurang baik.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi dari Indikator Kreatifitas untuk melihat Profesional atau tidaknya aparatur desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa maka peneliti menganggap bahwa Aparatur Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Kurang Profesional dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa karena tidak tercapai atau terwujudnya kriteria penilaian dari Indikator Kreatifitas untuk melihat Profesionalisme Aparatur Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2 Indikator Inovasi

Inovasi dalam pelaksanaan Pemerintahan merupakan hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai.

4.2.1 Tanggapan Informan tentang Sejauh mana keinginan aparatur desa dalam menciptakan pembaharuan atau inovasi

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa keinginan dan tekad untuk menciptakan sebuah inovasi di miliki oleh setiap aparatur desa, dan berdasarkan tanggapan dari Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa tadi maka peneliti menganggap hal ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian.

4.2.2 Tanggapan Informan tentang tekad aparatur desa untuk metode kerja baru dalam pelaksanaan tugas

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan hasil observasi dan pengamatan peneliti karena pada kenyataan yang sebenarnya tekad aparatur desa untuk menggunakan metode kerja baru dalam pelaksanaan tugas masih kurang, hal ini bisa di lihat dari kurangnya kemampuan aparatur dalam menciptakan sebuah inovasi.

4.2.3 Tanggapan Informan tentang keinginan aparatur desa untuk berkembang dan mengembangkan diri dalam pelaksanaan tugas

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa hal ini sesuai dengan hasil observasi dan pengamatan peneliti karena pada kenyataan yang sebenarnya keinginan aparatur desa untuk berkembang dan mengembangkan potensi diri dalam pelaksanaan tugas masih kurang, hal ini bisa di lihat dari kurangnya tekad aparatur desa untuk menggunakan metode kerja baru dalam pelaksanaan tugas.

4.2.4 Tanggapan Informan tentang tentang strategi yang di terapkan oleh aparaturdesa untuk menciptakan inovasi dalam pelaksanaan tugas

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa strategi yang di lakukan oleh aparatur desa belum terlaksana dengan baik, hal ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya selama peneliti melakukan observasi dan pengamatan di tempat penelitian.

Berdasarkan pengamatan dan observasi peneliti bahwa keinginan atau hasrat dari aparatur desa untuk menciptakan inovasi kelihatannya masih kurang, hal ini di sebabkan karena tidak ada nya keinginan dari diri aparatur tersebut, karena keinginan sangat berpengaruh dalam melakukan sebuah inovasi, selama ini yang peneliti lihat hanya menerima upah atau gaji dari jabatan perangkat/aparatur saja tanpa sepenuh hati dan meresapi arti dan makna sebagai aparatur desa yang mana hakikatnya adalah sebagai pelayan bagi masyarakat bukan masyarakat yang melayani aparat desa. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di butuhkan kemampuan dan pengalaman supaya pelayanan yang di berikan terlaksana dengan baik, jika pelayanan sudah terlaksana dengan baik maka secara otomatis akan menunjang dan mendorong keinginan yang timbul dari dalam diri aparatur desa untuk mengembangkan, memperbaharui system kerja yang ada maupun tentang pelayanan yang lebih baik. Dengan demikian, maka terciptalah inovasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa yang maju. Akan tetapi, hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan realita atau kenyataan yang terjadi karena tidak sesuai dengan harapan untuk menciptakan inovasi, untuk menciptakan sebuah inovasi tidak hanya sekedar ucapan lisan tapi harus di sertai dengan keinginan dan tekad yang kuat karena sudah tentu dan pasti hambatan-hambatan yang terjadi selama pencapaian inovasi pasti ada dan itu sudah pasti, untuk menghadapi hambatan-hambatan inilah di butuhkan kemampuan dari aparatur desa bagaimana menghadapi dan mengantisipasi resiko dari inovasi yang di buat. Dari hasil pengamatan peneliti di Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai mengenai Profesionalisme dari aparatur desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa maka peneliti menganggap bahwa berdasarkan item penilaian dari Indikator Inovasi untuk melihat profesional atau tidaknya aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur desa Kurang Profesional dalam melaksanakan Pemerintahan Desa sesuai dengan hasil observasi dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

4.3 Indikator Responsifitas

Responsifitas dalam pelaksanaan Pemerintahan merupakan Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru dan perkembangan

baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru terhadap sebuah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Responsifitas mengacu kepada respon atau tanggapan terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi.

4.3.1 Tanggapan Informan Bagaimana kemampuan aparatur desa mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru dalam pelaksanaan tugas

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pentingnya kemampuan untuk mempertimbangkan dampak atau hasil yang akan terjadi karena sangat mempengaruhi dalam menghadapi aspirasi baru dalam pelaksanaan tugas.

4.3.2 Tanggapan Informan tentang tindakan yang di lakukan oleh aparatur desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pentingnya melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat untuk mengenali kebutuhan dari masyarakat tersebut.

4.3.3 Tanggapan Informan tentang Seperti apakah kemampuan aparatur dalam mengembangkan program pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa untuk mengembangkan program pelayanan kemampuan aparatur desa sudah sangat baik, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan observasi dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian karena belum ada di temukan pengembangan program pelayanan kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan dan observasi peneliti selama melakukan penelitian di Desa Pulau Kaimanting Kecamatan Benai, hal yang paling menonjol jika di nilai berdasarkan teori Responsifitas yaitu tidak adanya tanggapan dari aparatur desa terhadap hambatan yang terjadi, hambatan itu bisa berupa pelayanan yang kurang baik, kurangnya kemampuan atau keahian dari beberapa orang perangkat desa tentang pelaksanaan tugas, dan hambatan-hambatan lainnya yang seharusnya di tanggapi oleh aparatur desa yang lainnya terutama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, karena salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu mengawasi jalannya Pemerintahan yang di jalankan oleh Kepala Desa, tapi sampai saat sekarang ini Badan Permusyawaratan Desa hanya diam dan tidak menanggapi, sedangkan mereka melihat dan menyaksikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang ini, pernah peneliti menanyakan alasan mengapa Badan Permusyawaratan Desa hanya diam dan tidak menanggapi profesionalitas dari Kepala Desa beserta perangkatnya kemudian salah satu dari anggota Badan Permusyawaratan Desa menjawab sebenarnya saya sendiri selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah pernah menyampaikan hal demikian kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa tapi beliau sama sekali tidak memberika respon atau pun tanggapan terhadap usulan dari saya selaku anggota, saya menyampikan usulan ini karena adanya aspirasi dari masyarakat yang saya terima untuk itu saya sampaikan supaya di tindak lanjuti atau di tanggapi oleh beliau selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa tapi sampai saat sekarang ini masih belum ada tanggapan yang di berikan, mungkin karena tidak ingin merusak hubungan baik antara beliau dengan Kepala Desa, karena tidak ingin membuat keributan dengan Kepala Desa oleh karena itu kami hanya diam karena kami ini hanya anggota. kalau masyarakat pernah mengajukan dan menyampaikan aspirasi terhadap profesionalitas aparatur desa supaya di tingkatkan tapi kami tidak memberikan tanggapan sama sekali dan hal ini menurut peneliti Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kalimantan belum profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, seharusnya Badan Permusyawaratan Desa memberikan tanggapan atau pun teguran kepada Kepala Desa beserta perangkat bawahannya supaya lebih memperhatikan dan

meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa dengan meningkatkan kemampuan aparatur desa menghadapi hambatan yang terjadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian mempunyai keinginan untuk berkembang dan keinginan untuk maju dengan cara menciptakan dan menggunakan cara atau metode kerja baru dalam pelaksanaan tugas, jika hal ini sudah terlaksana dengan baik maka secara otomatis akan terciptalah responsifitas yang baik dalam menyikapi dan menanggapi hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Dengan demikian maka tercapailah indikator Profesionalisme dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tanggapan peneliti masih sama yaitu belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan memang sampai saat sekarang ini belum adanya pengembangan program pelayanan kepada masyarakat selama peneliti melakukan observasi dan pengamatan di tempat peneliti.

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan aparatur desa Pulau Kalimantan kurang Profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana Pemerintahan Desa. Hal ini dapat di lihat berdasarkan kriteria penilaian dari tiga Indikator di atas yang menunjukkan hasil bahwa masih kurangnya kemampuan aparatur desa dalam menghadapi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat dan kurangnya kemampuan untuk menciptakan sebuah inovasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur desa sehingga menimbulkan hambatan untuk mengembangkan program pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan dan observasi peneliti bahwa keadaan realita atau kenyataan yang terjadi pada saat sekarang ini sangat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan teori-teori atau indikator tentang profesionalisme. Oleh karena itu maka peneliti menyimpulkan bahwa Aparatur Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Kurang Profesional dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis., MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku dekan Fakultas ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip. M.Si sebagai pembimbing I (satu) yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan proposal ini

5. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II (dua) yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan proosal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Perangkat desa Pulau Kalimantan yang telah banyak memberi informasi mengenai data yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini.
8. Orang tua penulis Ayahanda Marsali dan Ibunda Budi warni Serta kakanda Ripendrizal, S.Pd.I yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'a nya untuk penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Rekan - rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas semangat dan kerja samanya.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti, bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Jamaludin.2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Dan Teori Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, S. Dan Jabar, 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis kebijakan public edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjha Mada University Press
- Hadjon, Philipus M. 2012. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Istijanto. 2006. *Riset sumber Daya Manusia*. Jakarta :PT. Gramedia Pusaka Utama
- Kuncoro, Mudrajad, Ph.D. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Kreitner, R dan Kinicki, A. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa beta
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Cetakan Pertama*. Bandung: Penerbit Alfabeta

- Mustopadidjaja AR, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Rivai, V dan Mulyadi, D. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Siagian, Sondang, P, 2000. *ManajemensumberDayaManusia*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Patologi Birokrasi*, Galia Indonesia, Jakarta
- Syafiie, InuKencana, 2011. *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citra,
- Syafiie, InuKencana, 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Citra,
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi. Cetakan Pertama* Bandung : Fokusmedia
- Sugiono. 2014. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung : alfabeta
- _____. 2016. *Metode penelitian Administrasi* . Bandung : Alfabeta
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Subekhi, Ahmad, dan Jauhar, M. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. Cetakan Pertama*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sumarto Hetifa Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung : Yayasan Obor Indonesia
- Sutrisno, Edy, 2009, *Manajemen Sumber Daya manusia Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana

